

**PARTISIPASI POLITIK ETNIS TIONGHOA DALAM KEIKUTSERTAAN
PEMILUKADA DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2015**

**Oleh :
ROSITA**

Email: Putribenai95@gmail.com

Pembimbing: Adlin S, Sos. M.si

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Program studi Ilmu pemerintahan FISIP Universitas Riau
Kampus bina widyia Jl. H. R. Soebrantas KM. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293.
Telp/fax. 0761-63277

Abstract

In 2015 Rokan Hulu has confirmed the Draft Budget Revenue and Expenditure (budgets) Rokan Hulu in 2015 to (Perda) Government Budget Rokan Hulu in 2015 with a total of Rp. 1,566 trillion. The budget deficit of Rp. 273 billion due to the reduction in Fund Balance of the Central Government. In contrast to the passage of budgets in 2015, apparently in the process of preparation of the proposed budget amendment of 2015 is not like a trip to the discussion of budgets approved in 2015. The adjustment of the budget with the development and changes in circumstances should be discussed with the Provincial Government and Rokan Hulu in the framework of the preparation of forecasts of changes in the budget financial year 2015 to be no impact. However, up until 31 December 2015 RAPBD-P 2015 are not being discussed.

*The study was made by using Qualitative Approach (Qualitative Approach) with qualitative analysis model. This study attempted to look at the phenomenon that is on the field and then analyzed by comparing the various theories that have been presented so clearly visible gaps between *das sollen* and *das sein*. Based on the findings of this study show that: First, political communication between the local government (Local Government) and Parliament (DPRD) Rokan Hulu runs less harmonious, this is evidenced by vulnerable time between the letter as a medium of political communication is very long and too late in terms of the rule of law in the discussion RAPBD-P Year 2015. second, technical factors (normative) and political factors that affect political communication between the two institutions in the discussion RAPBD-P 2015.*

Keywords: Political Communication, Local Government, Parliament, RAPBD-P.

A. Pendahuluan

Pemilihan umum di Indonesia merupakan manifestasi demokrasi. Dalam pemilihan umum, masyarakat diberi ruang apresiasi dalam menentukan hak politiknya untuk agenda lima tahun perjalanan suatu Negara. Pemilihan umum merupakan momentum tepat dalam mengimplementasikan hak warga Negara untuk menjalankan kedaulatan untuk berpartisipasi aktif pada pemilihan umum, sehingga terwujud masyarakat yang demokrasi dan berkedaulatan rakyat.¹

Dalam undang-undang Nomor 22 tahun 2007 pada bagian ketentuan umum pasal 1 pengetahuan pemilihan umum (pemilu) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.²

Dalam melakukan pilihannya, para pemilihan tidak sepenuhnya otonom. Hal-hal lain seperti ideology, keyakinan, dan agama yang dianut, kelas, kelompok, dan relasi-relasi lain, juga bisa berpengaruh terhadap pilihan seseorang, tetapi adanya prosedur bahwa rakyat bisa menentukan pilihannya di bilik-bilik pemungutan suara sendiri secara jujur dan adil akan lebih memungkinkan para pemilih lebih otonom.³

Luasnya partisipasi politik dalam sebuah tatanan Negara membuat warga Negara harus pintar-pintar memilih dan memilah akan keikutsertaannya dalam berpolitik meskipun hanya dalam bentuk partisipasi politik yaitu dengan ikut pemilihan Kepala Daerah. Sekalipun

karena dampak yang akan muncul dari keputusan yang di ambilnya akan mempengaruhi kehidupannya dalam masyarakat. Karena apapun yang telah diperbuat tentu ada konsensusnya.⁴

Kabupaten Kuantan Singingi secara geografis. Geoekonomi dan geopolitik terletak pada jalur tengah lintas Sumatera dan berada dibagian selatan Provinsi Riau. Yang mempunyai peran yang cukup strategis sebagai simpul perdagangan untuk menghubungkan daerah produksi dan pelabuhan, terutama pelabuhan kuala Enok. Dengan demikian Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai peluang untuk mengembangkan sektor-sektor pertanian secara umum, perdagangan barang dan jasa, transportasi dan perbankan serta pariwisata. Kabupaten Kuantan Singingi merupakan Pemekaran dari Kabupaten IndraGiri Hulu yang dibentuk berdasarkan UU No. 53 tahun 1999, tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak, Natuna, Karimun, Kuantan Singingi dan Kota Batam. Kabupaten Kuantan Singingi yang saat ini terdiri dari 15 (lima belas) kecamatan.

Dengan adanya seorang warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa beragama Islam, dari Etnis Tionghoa di Kabupaten Kuantan Singingi, seorang pengusaha perkebunan kelapa sawit, yang keinginannya maju mencalonkan diri sebagai Wakil bupati murni karena panggilan jiwa serta ingin memantu melalui birokrat yaitu bapak H.Halim alias Aliang, H.Halim adalah warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa beragama islam. Jadi penelitian ini ingin mengetahui lebih dalam tentang seberapa besar peran dan keinginan H.Halim dalam ikutserta jadi calon Wakil Bupati Kabupaten

¹Nadir,Ahmad,*Pilkada Langsung,dan masa depan demokrasi*,malang: averroes press, 2008.,8

² Undang-undang No 22 tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilihan umum

³ Levi, riansyah, politik, *partisipasi dan demokrasi dalam pembangunan*, malang,averroes, 2009.,1

⁴ <http://antarariau.com/berita/55311/pasangan-mursini-halim-berpeluang-dapat-dukungan-dikuansing>

Kuantan Singingi pada pemilukada tahun 2015.

Maksud penelitian ini mengenai berapa besar partisipasi politik dan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi (H.Halim dari Etnis Tionghoa) dalam ikutserta sebagai calon wakil Bupati dalam pemilukada yaitu tentang apakah dengan status H.Halim yang secara garis besarnya dilihat dari jenis pekerjaannya maupun pendidikannya, atau H.Halim memiliki pengaruh yang signifikan dalam perannya ikutserta sebagai calon Wakil Bupati pada Pemilukada di Kabupaten Kuantan Singingi. Berdasarkan hasil data yang diperoleh dari KPU Kuansing semenjak pemilihan umum kepala daerah dari periode 2006 dan 2011 sekarang pemilihan tahun 2015, kandidat yang mempunyai latar belakang dari etnis atau suku Tionghoa belum pernah mencalonkan pada periode pemilihan sebelumnya pada periode pemilihan umum tahun 2015 inilah seorang dari etnis Tionghoa mencalonkan diri, Untuk lebih jelasnya kita dapat dilihat nama-nama pasangan calon bupati dan wakil bupati pada pemilukada pada periode sebelumnya, dan dapat kita lihat jumlah dan suku dari yang mencalonkan diri pada pada setiap periodenya mulai dari pemilihan periode 2006, 2011 dan tahun pemilukada 2015.

Pemilihan umum Bupati dan wakil Bupati di Kabupaten Kuantan Singingi yang telah dilaksanakan pada tanggal 09 Desember 2015 kemaren, dimana pada pemilihan ini keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi tentang penetapan calon bupati dan wakil bupati menetapkan calon sebagaimana dimaksud dalam table 1.3 di atas. Dimana kita juga bisa lihat angka partisipasi pemilihan umum di Kabupaten Kuantan Singingi Nomor: 91/Kpts/KPU-Kab-004.435177/XII/2015, tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan hasil pemilihan bupati dan wakil

bupati dari 15 kecamatan/kota dalam pemilihan sebagai berikut :

Berdasarkan hasil data di atas dapat dilihat pada pemilihan umum kepala daerah dari tahun tahun 2015 suara yang paling terbanyak pada calon No urut 2, bisa kita lihat masyarakat lebih banyak memilih pasangan calon Drs. H. MURSINI, M.Si dan H. HALIM, pasangan nomor urut 2 dengan pasangan nomor urut lain terlibat berbeda tipis, terutama dengan pasangan calon nomor urut 1, yaitu pasangan INDRA PUTRA, ST dan Sdri. KOMPERENSI, SP. M.Si terpaut tipis sebanyak 348 suara.

Dimana ada seorang kandidat dari masyarakat etnis Tionghoa yang mencalonkan diri sebagai wakil Bupati Kuantan Singingi dan H.Halim ini adalah sebagai pengusaha sukses dibidang perkebunan kelapa sawit. sejumlah tokoh masyarakat, baik dikalangan politis, pengusaha telah menyatakan diri bertarung pada pilkada 2015 mendatang. Salah satunya, pengusaha sukses asal Kuansing, H. Halim alias Aliang, Halim adalah warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa beragama islam ia adalah seorang pengusaha, berpasangan dengan mantan Wakil Bupati Kuantan Singingi pada periode lalu Bapak Drs.H. Mursini,M,Si.

Berdasarkan uraian latar belakang maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Partisipasi Politik Etnis Tionghoa Dalam Keikutsertaan Pemilukada di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015”**

B. Tinjauan Pustaka

1. Partisipasi Politik

Herbert McClosky seorang tokoh masalah partisipasi berpendapat yaitu, partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses

pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.⁵ Dalam negara Demokrasi partisipasi politik masyarakat merupakan tolak ukur dari keberhasilan sistem politiknya. Semakin banyak warga negara berpartisipasi menunjukkan semakin berhasil sistem politik negara tersebut.

Partisipasi menurut Samuel P. Huntington merupakan aktivitas dari warga negara secara pribadi yang direncanakan untuk mempengaruhi pembuatan keputusan pemerintah. Partisipasi tersebut dapat dilakukan secara individu maupun kolektif terorganisir maupun spontan, terus menerus atau sporadik, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif.⁶

a. Bentuk-bentuk Partisipasi Politik

Sedangkan Samuel P. Huntington dan Jhon Nelson (1994) membagi bentuk-bentuk partisipasi politik yang berbeda dengan tipologi yang dibuat oleh para ahli yang disebut diatas, adapun bentuk-bentuk partisipasi politik meliputi :

1. Kegiatan pemilihan, mencakupi suara, juga sumbangan-sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, mencari dukungan dibagi seorang calon, atau setiap tindakan yang bertujuan memengaruhi hasil proses pemilihan.
2. *Lobbying*, mencakup upaya-upaya perorangan atau kelompok untuk menghubungi pejabat-pejabat pemerintah dan pemimpin-pemimpin politik dengan maksud memengaruhi keputusan-keputusan mereka mengenai persoalan-persoalan yang mengangkut sejumlah besar orang. Seperti, kegiatan yang mengangkut sejumlah besar orang. Dukungan bagi atau oposisi terhadap

suatu usul legislative atau keputusan administrative tertentu.

3. Kegiatan organisasi menyangkut partisipasi sebagai anggota atau pejabat dalam suatu organisasi yang bertujuan yang utama dan eksplisit adalah mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah.

4. Mencari koneksi (*contacting*) merupakan tindakan perorangan yang ditujukan terhadap pejabat-pejabat pemerintah dan biasanya dengan maksud memperoleh manfaat bagi hanya satu orang atau segeintir orang.

5. Tindakan kekerasan (*violence*) juga dapat merupakan suatu bentuk partisipasi politik, dan untuk keperluan analisis dan manfaatnya untuk mendefinisikan sebagai satu kategori tersendiri, artinya sebagai upaya untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah dengan jalan menimbulkan kerugian fisik terhadap orang-orang atau harta benda.⁷

Kelima bentuk partisipasi menurut P.Huntington dan Nelson telah menjadi bentuk klasik dalam studi partisipasi politik. Keduanya tidak membedakan apakah tindakan individu atau kelompok di tiap bentuk partisipasi politik legal atau ilegal. Sebab itu ancaman, dan pemerasan dan sejenisnya di tiap bentuk partisipasi politik adalah masuk kedalam kajian ini. Di Negara yang menganut paham demokrasi, bentuk partisipasi politik masyarakat yang paling mudah diukur adalah ketika pemilihan umum berlangsung. Sejauh ini hanya disinggung masalah partisipasi dalam pengertian keikutsertaan, padahal dalam realitasnya tidak sedikit warga Negara yang menghindari atau tidak menaruh perhatian sama sekali.

Untuk mengetahui bentuk partisipasi politik dalam pemilu

⁵ Ibid.,

⁶ Miriam Budiardjo, *Op.Cit.*,368

⁷ Samuel, P Huntington, *Partisipasi Politik di Negara Berkemban*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994., 16-17

penulis menggunakan pendapat di atas pada bagian bentuk partisipasi politik bagian 1 yaitu:

1. Donatur Kampanye
2. Tim Pemenangan
3. Sebagai calon Kandidat⁸

adapun bentuk-bentuk partisipasi tersebut yang dijadikan penulis sebagai indikator dalam penulisan ini.

b. faktor-faktor partisipasi politik

Milbrath menyebutkan 5 faktor utama yang mendorong orang berpartisipasi politik, antara lain :

1. sejauh mana orang menerima perangsang politik karena adanya perangsang, maka seseorang mau berpartisipasi dalam kehidupan politik. Dalam hal ini minat untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. Dalam hal ini minat untuk berpartisipasi dipengaruhi misanya oleh sering mengikuti diskusi-diskusi politik melalui media massa atau melalui diskusi formal.
2. Factor karakteristik pribadi seseorang Orang-orang yang berawatak sosial yang mempunyai kepedulian sosial yang besar terhadap problem sosial, politik, ekonomi, sosia budaya, biasanya mau terliabat dalam aktivitas politik.
3. Karakteristik sosial seseorang Karakteristik sosial mengangkut status sosial ekonomi, kelompok ras, etnis dan agama seseorang. Bagaimanapun juga lingkungan sosial itu mempengaruhi persepsi, sikap, perilaku seseorang dalam bidang bidang politik.
4. Keadaan politik, Lingkungan politik yang kondusif membuat orang dengan senang hati berpartisipasi dalam kehidupan politik. Dalam lingkungan politik yang demokratis orang merasa lebih bebas dan nyaman untuk terlibat dalam aktifitas-aktifitas politik.
5. Pendidikan politik

⁸ Ibid., 16

Adapula yang menambahkan sebagai pendidikan politik sebagai warga Negara merupakan factor pendukung lainnya yang bersifatnya internal bagi suatu kelompok yang melaksanakan partisipasi politiknya.⁹

Disamping mereka yang ikut serta dalam satu atau lebih banyak partisipasi, ada warga Negara masyarakat yang sama sekali tidak terlibat diri dalam kegiatan politik. McClosky berpendapat bahwa ada yang tidak ikut pemilihan karean sikap acuh dan tidak tertarik atau kurang paham mengenai masalah politik. Ada juga karean tidak yakin bahwa usaha untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah akan berhasil dan ada juga yang sengaja tidak memanfaatkan kesempatan memilih karena kebetulan berada didalam lingkungan dimana ketidaksertaan merupakan hal yang terpuji.¹⁰

2. Politik Identitas

Menurut Castells, politik identitas merupakan partisipasi individual pada kehidupan sosial yang lebih ditentukan oleh budaya dan psikologis seseorang. Identitas merupakan proses individu yang memberikan arti dan tujuan hidup dari individu tersebut, karena terbentuknya identitas adalah dari proses dialog internal dan interaksi sosial.¹¹ Politik identitas merupakan suatu alat perjuangan politik suatu etnis untuk mencapai suatu tujuan tertentu, dimana kemunculannya lebih banyak disebabkan oleh adanya faktor-faktor tertentu yang dipandang oleh suatu etnis sebagai adanya suatu tekanan berupa ketidakadilan politik yang dirasakan oleh mereka. Berdasarkan perasaan senasib tersebut, maka mereka bangkit menunjukkan identitas atau jati diri

⁹ Rafael, Raga, Margan, *pengantar sosiologi politik*, jakarta: PT Rineka Cipta, 2007., 160

¹⁰ Miriam Budiardjo, *Op.Cit.*, 370

¹¹ Buchari, Sri Astuti. *Kebangkitan etnis menuju politik identitas*. Jakarta: yayasan pustaka obor Indonesia. 2014.,19

etnisnya dalam suatu perjuangan politik untuk merebut kekuasaan dengan memanipulasi kesamaan identitas atau karakteristik keetnisan tertentu yang tumbuh di dalam kehidupan sosial budayanya.¹²

3. Budaya Etnis Tionghoa

Etnis Tionghoa adalah orang-orang keturunan Cina yang telah menetap di Indonesia. Dengan demikian akan mudah membedakan bahwa orang cina yang WNI dengan orang Cina yang bukan WNI. Menurut Suryadinata orang Tionghoa yang telah menetap dan menjadi bagian dari Indonesia sepadan dengan orang Jawa, orang Sunda, orang Madura, orang Melayu dan lain-lain. Tujuan mereka ke Indonesia adalah untuk berdagang ataupun berimigrasi.¹³

Istilah Tionghoa atau peranakan Tionghoa sesuai hukum dan konstitusional tercantum dengan jelas pada pasal 26 UUD 1945 yang sampai saat ini masih berlaku. Adapun pasal tersebut berbunyi : *“ yang menjadi warga Negara ialah orang-orang indonesia asli yang disahkan dengan UU sebagai warga Negara ”* kemudian pada penjelasan pasal 26 ayat 1 ditegaskan bahwa : *“ yang dimaksud orang-orang bangsa lain, misalnya orang peranakan Belanda, peranakan Tionghoa (bukan peranakan Cina dan peranakan Arab yang bertempat tinggal di Indonesia menjadi sebagai tanah airnya dan bersikap setia kepada Negara RI dan dapat menjadi warganya ”*¹⁴

4. Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan kepala daerah (pilkada) merupakan salah satu upaya untuk menunjukkan kehidupan yang demokratis.

Menurut kamus istilah politik dan kewarganegaraan demokrasi adalah pemerintahan rakyat, dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sistem pemerintahan seperti ini rakyat yang memegang kekuasaan yang sepenuhnya dan yang menjalankan sistem pemerintahan itu adalah wakil-wakil rakyat yang dipilih dalam pemilu. Beberapa kriteria demokrasi terdiri dari :

- 1) pemerintahan oleh rakyat dengan partisipasi rakyat penuh dan langsung,
- 2) kesamaan warga negara di depan hukum,
- 3) adanya pluralisme, penghargaan atas perbedaan,
- 4) penghargaan terhadap pribadi untuk mengekspresikan kepribadian individu.¹⁵

Ramlan Surbakti menyatakan pemilihan adalah sarana memobilisasikan atau menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik.¹⁶

c. Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode kualitatif dimana menjelaskan suatu masalah dengan Batasan terperinci, pengambilan data yang benar dan akurat serta menyerta sebagai sumber informasi yang terpercaya. Penulis menguraikan dan mengumpulkan data dengan cara melakukan wawancara. Wawancara memiliki kelebihan dalam penelitian antara lain dapat memperoleh dengan cepat tentang informasi yang dibutuhkan , karena informasi dipercaya mampu menjawab suatu permasalahan secara relevan.

Dan penulisan ini dengan cara deskriptif yaitu sebagai prosedur pemecahan masalah yang dikaitkan

¹² Ibid., 20

¹³ Ibid., 160

¹⁴ Undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945

¹⁵ Leo Agustino, *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*, Yogyakarta: pustaka pelajar, 2009., 78

¹⁶ Ramlan Surbakti, *Op.Cit.*, 152

dengan menggambar keadaan atau subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang benar dan terpacaya.

mendeskripsikan atau menggambarkan secara menyeluruh dan dengan sistematis mengenai fenomena yang ada dalam kajian ini. Kemudian penulis menganalisis fenomena tersebut dan menuangkannya melalui interpretasi yang penulis pahami serta memberikan kemungkinan bagi perubahan-perubahan manakala ditemukan fakta-fakta yang lebih mendasar dan menarik di lapangan (Burhan Bungin, 2003).

d. Hasil Dan Pembahasan

1. Faktor Pendorong Partisipasi politik etnis Tionghoa Dalam Keikutsertaan Pemilukada di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015

Tidak dapat di pungkiri keberadaan Etnis Tionghoa sebagai kelompok minoritas juga memiliki arti penting bagi bangsa Indonesia. Peran mereka dalam ekonomi dan perdagangan sudah merupakan gejala yang universal terlihat di setiap daerah di Indonesia. Sehingga tidak ada lagi alasan yang menyatakan bahwa perbedaan identitas kewarganegaraan membuat perbedaan akan kewajiban dan hak-hak politik. Demokrasi politik menggariskan setiap orang satu suara dalam hal-hal politik. Demokrasi ekonomi sebaliknya menuntut suatu mekanisme pengaturan ketidaksamaan ekonomi menjadi menjadi keselarasan sosial. Demokrasi politik menjamin setiap wargaanegara berprestasi tanpa hambatan yang dibuat buat

berdasarkan faktor asal suku-suku, keturunan, ras, dan agama.¹⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan beberapa cacatan seperti yang di katakan Bapak H.Halim salah satu faktor pendorongnya untuk ikut serta dalam pemilihan umum kepala daerah kemaren karena panggilan jiwa prihatin dengan kehidupan masyarakat Kuantan Singingi dan ingin membantu masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi melalui birokrat.

- a. Pengaruh kondisi Sejauh Mana Orang Menerima Perangsang Politik terhadap Partisipasi Politik dalam Pemilukada.

Karena adanya perangsang, maka seseorang mau berpartisipasi dalam kehidupan politik. Dalam hal ini minat untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. Dalam hal ini minat untuk berpartisipasi dipengaruhi misalnya oleh sering mengikuti diskusi-diskusi politik melalui media massa atau melalui diskusi formal dan informal. Menerima perangsang politik merupakan sikap dan perilaku seseorang dalam bidang politik, maka akan menumbuhkan persepsi, sikap dan perilaku orang tersebut dalam partisipasi sosial dan partisipasi politik di lingkungan tempat tinggalnya.¹⁸

Sesuai dengan hasil wawancara dengan informan, dengan salah seorang masyarakat Etnis Tionghoa mereka terdorong untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan Bupati dan wakil Bupati di Kabupaten Kuantan Singingi karena ada rangsangan dari media masa dan berita-berita yang dibicarakan masyarakat saat masa pemilhan umum terjadi. Pemilihan kepala daerah secara langsung di

¹⁷ Suryadinata,Leo, "*Pemikiran Politik Etnis Tionghoa Indonesia 1900-2001*", Jakarta:Pustaka LP3ES Indonesia, 2005., 350

¹⁸ Rafael, Raga, Margan, pengantar sosiologi politik, jakarta: PT Rineka Cipta, 2007., 160

Kabupaten Kuantan Singingi telah dilaksanakan pada tanggal 09 Desember 2015. Pemilukada tersebut merupakan pengalaman pertama bagi masyarakat Kabuapten Kuantan Singingi di mana salah satu seorang kandi yang ikut serta keturunan Tionghoa yankninya Bapak H.Halim, dalam memilih pemimpin merupakan salah satu bentuk partisipasi untuk menjalankan suksesnya kepemimpinan di Kabupaten Kuantan Singingi.

b. Pengaruh kondisi Factor karakteristik pribadi seseorang Terhadap Partisipasi Politik dalam Pemilukada

Orang-orang yang berawatak sosial yang mempunyai kepedulian sosial yang besar terhadap problem sosial, politik, ekonomi, sosia budaya, biasanya mau terliabat dalam aktivitas politik. Dan cenderung matang dan mempunyai emosi yang stabil, serta mempunyai perhatian yang luas terhadap aktifitas-aktifitas sosial. Dan mempunyai keinginan menghargai dan di hargai. Karena dengan begitu akan lebih baik seorang pemimpin yang dengan kedewasaannya bertindak untuk mengambil suatu keputusan yang mengangkut dengan kegiatan nya.¹⁹

Masyarakat di Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai karakteristik pribadi sosial yang berbeda-beda, namun dari berbagai macam perbedaan itu masyarakat cukup banyak yang peduli dan sadar akan hak politik mereka sebagai masyarakat, dan khususnya masyarakat Etnis Tionghoa juga peduli dengan pemilukada yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi Mereka mau berpartisipasi dalam pilkada Kuantan Singingi dengan datang ke TPS dimana mereka tinggal sesuai dengan undangan yang mereka dapat.

¹⁹ Rafael, Raga, Margan, pengantar sosiologi politik, jakarta: PT Rineka Cipta, 2007., 160

C. Pengaruh Kondisi Karakteristik sosial seseorang terhadap Partisipasi Politik dalam Pemilukada

2. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis jelaskan diatas maka dapat ditarik poin penting yang menjadi kesimpulan yakni :

1. Unsur-unsur yang membangun komunikasi politik antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Rokan Hulu dalam rencana pembahasan RAPBD-P Tahun 2015 secara utuh sudah terlengkapi. Namun permasalahan yang muncul adalah ketika efek atau pengaruh dari pesan politik tersebut tidak dapat diinterpretasikan dengan baik sehingga menimbulkan dampak yang sangat signifikan terutama bagi masyarakat Kabupaten Rokan Hulu. Kemudian terdapat hal-hal yang tidak terkomunikasikan dengan baik yang mengindikasikan tidak harmonisnya komunikasi politik antara kedua lembaga tersebut. lamanya rentan waktu antar surat membuktikan bahwa interpretasi terhadap suatu penyampaian pesan politik sangat lambat untuk diartikan, sehingga RAPBD-P Tahun 2015 hingga tanggal 31 Desember 2015 tidak kunjung dibahas.
2. Dalam komunikasi politik antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Rokan Hulu terdapat dua faktor yang mempengaruhi proses tersebut. Pertama, adalah faktor teknis atau landasan normatif yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dimana Pemerintah Daerah mengalami keterlambatan dalam menyusun dan menyampaikan KUPA dan PPAS RAPBD-P Tahun 2015 kepada DPRD Kabupaten Rokan Hulu. Kedua, adalah faktor politik dimana

faktor ini juga mempengaruhi proses komunikasi politik antara kedua lembaga tersebut. Hal yang dimaksud adalah pertarungan politik dalam Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Kabupaten Rokan Hulu periode (2016-2021). Sehingga, terbentuklah koalisi pendukung masing-masing pasangan calon di DPRD yang secara tidak langsung menimbulkan pengaruh dan membiaskan rencana pembahasan RAPBD-P Tahun 2015 Kabupaten Rokan Hulu.

Adapun saran yang dapat diberikan berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bupati dan Wakil Bupati yang terpilih hendaknya menjalankan tugas dengan baik dan selalu dekat dengan masyarakat. Juga tetap mengutamakan kepentingan masyarakat demi membangun Kabuapten Kuantan Singingi yang maju dalam segala aspek. Peneliti mengharapkan kandidat bisa memihak kepada masyarakat dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi, agar masyarakat lebih mudah beraspirasi dan bisa memilih kepala daerah secara rasional. serta menjadi mendapatkan seorang pemimpin yang bisa membawa perubahan yang lebih baik untuk Kabupaten Kuantan Singingi kedepan.
2. Isu dan janji-janji kampanyenya agar diberikan kepada masyarakat sebaiknya ditepati dan dipenuhi agar masyarakat Etnis Melayu dengan adanya Kandidat Dari Etnis Tionghoa supaya masyarakat Kuantan Singingi percaya dan yakin dengan apa yang dijanjikan oleh Bupati dan Wakil Bupati yang terpilih yakni Bapak Drs.H.Mursini,M.Si dan H.Halim

sehingga tidak ada timbul rasa kecewa dalam masyarakat yang Kuantan Singingi memilih pasangan Drs.H.Mursini,M.Si dan H.Halim dalam pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

3. Masyarakat Etnis Tionghoa diharapkan untuk tetap aktif dalam pemilihan mengingat perolehan suara besar dan tetap mempertahankannya. Bahwa kandidat dari Etnis Tionghoa menang dan menjabat sebagai Wakil Bupati Kuantan Singingi. Karena dari etnis mana saja yang penting dalam negara demokrasi tidak melihat status dari mana seorang pemimpin itu, karena memegang penuh kekuasaan adalah masyarakat dalam memilih pemimpinnya dengan secara langsung.

Daftar Pustaka

- Agustino, Leo. 2009. *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Buchari, Sri Astuti. 2014. *Kebangkitan Etnis Menuju Politik Identitas*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Damsar. 2012. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Kencana
- Dawis. Amiee. 2010. *Orang Indonesia Mencari Identitas*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Kaelan. 2010. *Pendidikan Pancasila*. Jakarta: Paradigma
- Maran, Rafael Raga. 2007. *Pengantar sosiologi Politik*, Jakarta: PT Rineka Cipta
- Nadir, Ahmad. 2005. *Pilkada langsung, dan masa Depan Demokrasi*. Malang: Averroes Press
- Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*. Bogor: Grialia Indonesia
- Rush, Michael dan Philip Althop. 2005. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Samuel. P Huntington dan Joan Nelson. 1994. *Partisipasi Politik Di Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta
- Syfiie. Inu Kencana. 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta

- Soekanto. Prof. Dr. Soerjono. 2012. *Sosiologi suatu pengantar*. Jakarta: Penerbit Rajawali Pers Devisi Buku Perguruan Tinggi PT. Raja Grafindo Persada
- Sitepu, P. Anthonius. 2012. *Teori-Teori Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Suko, Susilo. 2003. *Sosiologi Politik*. Surabaya: Yayasan Kampusina
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung :CV Alfabeta
- Surbakti, Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Grasindo.
- Suryadinata, Leo. 2005 *Kebudayaan Minoritas Tiongho Di Indonesia*. Jakarta:Gramedia
- Suryadinata, Leo. 2005. *Pemikiran Politik Etnis Tionghoa Indonesia*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia
- Jurnal:**
- Ismail. 2004.*Partisipasi Politik Etnis Tionghoa Dalam Pelaksanaan PemiluKada*, Pekanbaru: Jurnal Demokrasi Dan Otonomi Daerah .Volume 12, Nomor 02.
- Rizky Hani S.P. 2013. Partisipasi politik etnis Tionghoa dalam pemiluKada tahun 2009 (studi kasus Desa Kragan Kec. Kragan Kab. Rembang), Surabaya: Jurnal Paradigma. Volume 01, Nomor 01
- Peraturan Perundang-Undangan:**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2007 Tentang “Pemilihan Umum”
- Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- Wabsite**
- <http://antarariau.com/berita/55311/pasangan-mursini-halim-berpeluang-dapat-dukungan-di-kuansing>